

# **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA BAGI HASIL SERTA DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DI KOTA SAMARINDA**

**NUR ABDI AULIA RAHMAN  
NIM.1101015387  
FAKULTAS ILMU EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SAMARINDA**

## **ABSTRACT**

The purpose of this research is to result of the influence of Local Own Sources Revenue (PAD), Revenue Sharing Fund (DBH) and General Allocation Fund (DAU) to the Capital Expenditure (BM). The independent variables are Local Own Sources Revenue (PAD), Revenue Sharing Fund (DBH) and General Allocation Fund (DAU). Meanwhile, the dependent variabel is using Capital Expenditure (BM). This research data in the form of secondary data in the form of Performance Accountability Report of Government Institution (LKjIP) of Samarinda City in 2010-2017. The analysis method has been done by using multiple linier regressions. The result of this research show that (1) Local Own Source Revenue (PAD) has influence to the Capital Expenditure (BM) (2) Revenue Sharing Fund (DBH) does not have any influence to the capital expenditure (BM) (3) General Allocation Fund (DAU) does not have any influence to the capital expenditure (BM)

Keywords : Local Own Resource, Profit Sharing Fund, General Allocation Fund, Capital Expenditure.

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal (BM). Variabel-variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sedangkan untuk variabel dependen pada penelitian ini adalah Belanja Modal (BM). Data penelitian ini berupa data sekunder dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Samarinda tahun 2010-2017. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal (BM), (2) Dana Bagi Hasil (DBH) Tidak Berpengaruh Terhadap Belanja Modal (BM), (3) Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah pusat melakukan campur tangan terhadap daerah dengan alasan untuk menjamin stabilitas nasional dan masih lemahnya sumber daya manusia yang ada di daerah. Karena dua alasan tersebut, sentralisasi otorisasi dipandang sebagai prasyarat untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada awalnya pandangan tersebut terbukti benar. Sepanjang tahun 70-an dan 80-an, Indonesia mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabilitas politik yang mantap. Namun dalam jangka panjang, sentralisasi seperti itu menimbulkan ketimpangan dan atau ketidakadilan, rendahnya akuntabilitas, lambatnya pembangunan infrastruktur sosial, rendahnya tingkat pengembalian proyek-proyek publik, serta memperlambat pengembangan kelembagaan sosial ekonomi di daerah.

Adapun yang mendorong diberlakukannya otonomi daerah adalah dikarenakan tidak meratanya pembangunan yang berjalan selama ini sehingga menyebabkan ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu juga terdapat campur tangan dari pemerintah pusat di masa lalu mengakibatkan terhambatnya pengembangan yang dimiliki oleh daerah. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan pemerataan, prinsip demokrasi, keistimewaan dan kekhususan, keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan penerapan otonomi daerah yang luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan, seperti memelihara kesinambungan fiskal secara nasional (Widjaja, 2002)

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 ditegaskan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dilakukan transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan non pajak. Selain dana perimbangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Diharapkan dana transfer dari pemerintah pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu kebijakan penggunaan dana harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Belanja Modal**

Belanja Modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang sifatnya rutin seperti biaya operasional dan Pemeliharaan Menurut Halim (2002). Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapasitas aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang di alokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pengembangan ekonomi lokal. Adapun jenis-jenis dana perimbangan adalah sebagai berikut:

### **Dana Bagi Hasil (DBH)**

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, misalnya Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP).

Berdasarkan UU PPh yang baru (UU Nomor 17 Tahun 2000), mulai tahun anggaran 2001 Daerah memperoleh bagi hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi (*personal Income tax*), yaitu PPh Pasal 21 serta PPh Pasal 25 Orang Pribadi. Ditetapkan PPh Perorangan sebagai obyek bagi hasil dimaksudkan sebagai kompensasi dan penyelemat bagi daerah-daerah yang tidak memiliki SDA tetapi memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara (APBN). Volume perolehan pajak di daerah berasosiasi kuat dengan besarnya tingkat pendapatan berbasis pajak. Dengan demikian, daerah dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi cenderung memperoleh DBH pajak yang lebih tinggi pula.

### **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana ini adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Sebagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi DAU bagi daerah yang potensinya fiskal besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar, dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim 2002).

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal**

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja Modal. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Jadi, PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (Imas Sherli Febriana,2015).

### **Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah**

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam).

Melalui pengaturan dana bagi hasil, daerah diharapkan mampu mengelola keuangan dan mengalokasikannya untuk belanja-belanja pembangunan daerah secara tepat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Dana bagi hasil pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan yang bukan berasal dari PAD dan DAU.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Firnandi Heliyanto,2016) menunjukkan dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah**

Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar pembentuk anggaran pemerintah daerah, tujuan dari transfer DAU adalah untuk memperkuat kondisi fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

Dengan adanya transfer DAU ini, daerah bisa lebih fokus terhadap penggunaan PAD yang dimiliki guna untuk membiayai belanja daerah yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik. Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh daerah baik dari DAU maupun PAD, maka

daerah akan mampu memenuhi dan membiayai semua keperluan yang diharapkan oleh masyarakat.

Dalam penelitian (Firnandi Heliyanto,2016) fakta empiris dimana DAU mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya dana DAU akan memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan belanja daerah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Uji Hipotesis dan Alat Analisis**

Setelah semua data disusun, maka langkah selanjutnya dilakukan adalah analisis terhadap data agar dapat disistematiskan, sesuai dengan penelitian yaitu untuk mengetahui variabel terkait, maka dalam penulisan ini analisis data dilakukan untuk mengkaji kebenaran hipotesis beserta uraian penjelasannya.

Teknik ini merupakan metode yang digunakan peneliti menganalisa data, adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data dalam penelitian ini adalah melalui :

### **Uji Asumsi Klasik**

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah dilakukan pengujian asumsi klasik untuk mengetahui apakah data yang akan digunakan terbebas dari asumsi klasik atau tidak, yang terdiri dari sebagai berikut :

### **Uji Normalitas**

Uji Normalitas Adalah untuk mengetahui apakan nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Dalam penelitian ini menggunakan Program SPSS dengan menggunakan *Kolmogorof Smirnof*.

### **Uji Autokorelasi**

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dan dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan antara satu sama lainnya. Pengujian asumsi ketiga ini, dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW Test), yaitu untuk menguji apakah terjadi korelasi serial atau tidak dengan menghitung nilai  $d$  statistik. Salah satu pengujian yang digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi adalah dengan memakai uji statistik DW test. Jika nilai DW berada diantara  $-2$  sampai  $+2$  berarti tidak ada autokorelasi (Nugroho, 2005). Nilai DW dibandingkan dengan  $d_l$  dengan kriteria sebagai berikut :

### **Uji Heteroskedastisitas**

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians, dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang berjenis homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2007).

Uji statistik yang digunakan adalah Uji *Glesjer*. Jika nilai signifikansi variabel independen < 0,05 maka terdapat gejala heteroskedastisitas, sedangkan jika nilai signifikansi variabel independen > 0,05 tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

## Analisis Regresi

### Model Regresi

Metode ini digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda. Hal ini dimaksudkan untuk menguji kandungan PAD, DBH dan DAU terhadap belanja modal dengan melihat kekuatan hubungan antar belanja modal dengan PAD, DBH dan DAU. Model regresi linier berganda tersebut adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	= Belanja Daerah
X <sub>1</sub>	= Pendapatan Asli Daerah
X <sub>2</sub>	= Dana Bagi Hasil
X <sub>3</sub>	= Dana Alokasi Umum
α	= Bilangan Konstanta
β <sub>1</sub> , β <sub>2</sub> , β <sub>3</sub> ,	= Koefisien arah regresi untuk variabel bebas
ε	= Kesalahan residu (error)

### Koefisien Korelasi (R)

Koefisien Korelasi Linier Berganda adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara tiga variabel atau lebih (Hassan 2005:263)

$$R = R_{Y.12} = \frac{r_{Y1}^2 + r_{Y2}^2 - 2r_{Y1}r_{Y2}r_{12}}{1 - r_{12}^2}$$

Keterangan:

R <sub>Y.12</sub>	: Koefisien Korelasi Linier tiga Variabel
r <sub>Y1</sub>	: Koefisien Korelasi Variabel Y dan X <sub>1</sub>
r <sub>Y2</sub>	: Koefisien Korelasi Variabel Y dan X <sub>2</sub>
r <sub>12</sub>	: Koefisien Korelasi Variabel X <sub>1</sub> dan X <sub>2</sub>

### Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi Berganda digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan dari beberapa variabel (X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>) terhadap naik turunnya variabel Y (Hasan 2005:266)

$$R = R_{Y.12}^2$$

### Uji Statistik F

Untuk menguji kebenaran hipotesis dan hubungan antar variabel-variabel independen dan dependen, maka digunakan uji F atau Fisher Test (Uji Secara Keseluruhan) dengan rumus sebagai berikut:

$$F_h = \frac{R^2 / K}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Keterangan:

Fh = Fisher Test

R<sup>2</sup> = Koefisien Determinasi

k = Banyaknya Variabel Independen

n = Jumlah Sampel

### Uji Statistik t

Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Uji statistik t ini digunakan karena untuk memperoleh keyakinan tentang kebaikan dari model regresi dalam memprediksi.

Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel maka berarti t hitung tersebut signifikan artinya hipotesis alternatif diterima yaitu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan melihat *p-value* dari masing-masing variabel. Hipotesis diterima apabila *p-value* < 5 % (ghozali, 2006)

$t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $\alpha < 0,05$ , maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima.

$t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $\alpha > 0,05$ , maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>1</sub> ditolak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen, keduanya mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Uji ini dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorof Smirnof*. Uji ini dilakukan untuk menghasilkan angka yang lebih detail, apakah suatu persamaan regresi yang akan dipakai lolos normalitas. Suatu persamaan regresi dikatakan lolos uji normalitas apabila nilai signifikansi uji *Kolmogorof Smirnof* lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2006)

### Hasil Uji Normalitas (*Kolmogorof Smirnof*)

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		8
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0001068
	Std. Deviation	1.64464196E11
Most Extreme Differences	Absolute	.187
	Positive	.134
	Negative	-.187
Kolmogorov-Smirnov Z		.530
Asymp. Sig. (2-tailed)		.941

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan table 4.1 tersebut menunjukkan besarnya nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,941 yang berarti data terdistribusi normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

### Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier terdapat *korelasi* antara *residual* pada periode t dengan *residual* periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan antara satu sama lainnya. Pengujian asumsi ketiga ini, dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW Test), yaitu untuk menguji apakah terjadi korelasi serial atau tidak dengan menghitung nilai *d* statistik. Salah satu pengujian yang digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi adalah dengan memakai uji statistik DW test. Jika nilai DW berada diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. Hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat pada table berikut.

#### Hasil Pengujian Autokorelasi

##### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.866 <sup>a</sup>	.749	.561	2.176E11	1.514

a. Predictors: (Constant), DAU, DBH, PAD

b. Dependent Variable: BModal

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan table 4.2 tersebut menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,514 yang berada diantara -2 dan +2. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terdapat autokorelasi.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians, dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut heteroskedastisitas dan jika berbeda disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang berjenis homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji statistik yang digunakan adalah Uji *Glesjer*. Jika nilai signifikansi variabel independen < 0,05 maka terdapat gejala heteroskedastisitas, sedangkan jika nilai signifikansi variabel independen > 0,05 tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada table berikut.

### Hasil Pengujian Heteroskedastisitas Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.669E11	2.215E11		2.559	.063
PAD	-.877	.545	-.981	-1.609	.183
DBH	-.207	.123	-.841	-1.678	.169
DAU	.110	.133	.541	.833	.452

a. Dependent Variable: Abs\_ut

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan table 4.3 tersebut dapat dilihat nilai sig untuk ketiga variabel yaitu PAD sebesar 0,183, DBH sebesar 0,169 dan DAU sebesar 0,452. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masing-masing nilai signifikansi variabel independen lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini menggunakan program SPSS.

### Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.907E12	5.960E11		4.877	.008
PAD	-4.953	1.466	-1.542	-3.378	.028
DBH	-.724	.331	-.820	-2.188	.094
DAU	.853	.357	1.162	2.390	.075

a. Dependent Variable: BModal

Sumber : Data Diolah

Hasil estimasi model dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{Belanja Modal} = 2,907 - 4,953X_1 - 0,724X_2 + 0,853X_3$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa:

Nilai Konstansta ( $\alpha$ ) sebesar 2,907 menyatakan bahwa pada saat variabel PAD, DBH dan DAU bernilai Nol ( $X_1=0$ ,  $X_2=0$  dan  $X_3=0$ ) maka Belanja Modal bernilai 2,907 satuan.

Koefiensi regresi PAD sebesar -4,953 artinya Jika PAD mengalami perubahan sebesar 1% dan variabel independen lain bernilai tetap maka Belanja Modal akan mengalami penurunan sebesar 4,953%.

Koefisiensi regresi DBH sebesar -0,724 artinya jika DBH mengalami perubahan sebesar 1% dan variabel independen lain bernilai tetap maka Belanja Modal akan mengalami penurunan sebesar 0,724%.

Koefisiensi regresi DAU sebesar 0,853 artinya jika DAU mengalami perubahan sebesar 1% dan variabel independen lain bernilai tetap maka Belanja Modal akan mengalami peningkatan sebesar 0,853%

### Uji Hipotesisi

Uji hipotesis dalam penelitian ini diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik uji F dan nilai statistik uji T. perhitungan statistik disebut signifikan secara statistic apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana  $H_0$  ditolak), sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah  $H_0$  diterima (Ghozali, 2006). Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

$H_1$  : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Signifikan terhadap Belanja Modal.

$H_2$  : Dana Bagi Hasil berpengaruh Signifikan terhadap Belanja Modal.

$H_2$  : Dana Alokasi Umum Berpengaruh Signifikan terhadap Belanja Modal

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji Koefisiens determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur besarnya presentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Besarnya nilai  $R^2$  adalah  $0 \leq R^2 \leq 1$ , dimana semakin mendekati 1 berarti model tersebut dapat dikatakan baik karena semakin dekat hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen, demikian sebaliknya (Ghozali, 2006). Hasil pegujian koefisiensi determinasi dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 4.5**  
**Hasil Pengujian Koefisien Determinasi**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.866 <sup>a</sup>	.749	.561	2.176E11

a. Predictors: (Constant), DAU, DBH, PAD

Sumber : Data Diolah

Hasil tampilan diatas menunjukkan bahwa besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,561. Besarnya angka koefisien determinasi 0,561 atau sama dengan 56,1 %. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen PAD, DBH dan DAU sebesar 56,1 % sedangkan sisanya 43,9 % dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

### Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji Signifikansi simultan (Uji F) bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel terikat (Ghozali, 2006). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan hasil F hitung yang dibandingkan dengan F tabel dengan  $\alpha = 0,05$ . Hasil pengujian simultan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji F**  
**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.655E23	3	1.885E23	3.983	.108 <sup>a</sup>
	Residual	1.893E23	4	4.733E22		
	Total	7.549E23	7			

a. Predictors: (Constant), DAU, DBH, PAD

b. Dependent Variable: BModal

Sumber : Data Diolah

Hasil uji F (ANOVA) menunjukkan bahwa  $F_{Hitung} < F_{Tabel}$  yaitu  $3,983 < 4,76$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,180 > 0,05$  yang berarti PAD, DBH dan DAU secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

## Pembahasan

### Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Hasil uji koefisiensi parameter antara PAD terhadap Belanja Modal menunjukkan nilai koefisiensi sebesar -4,953 dengan nilai signifikansi sebesar 0,028 hasil pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama, PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal namun dengan arah negatif. Hal ini diartikan bahwa daerah yang mendapatkan PAD yang lumayan besar akan tetapi belum mampu untuk memberikan kontribusi terhadap belanja modal, karena porsi PAD masih sangat kecil untuk digunakan dalam membiayai belanja modal. Idealnya belanja modal pemerintah daerah dapat dicukupi dengan menggunakan PAD-nya. Akan tetapi, realitanya menunjukkan yang terjadi selama ini bahwa PAD sangat besar digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan belanja lainnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Imas Sherli Febriana (2015) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja modal.

### Pengaruh DBH terhadap Belanja Modal

Hipotesis Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal ini ditolak karena berdasarkan pengujian besarnya nilai signifikansi dari Variabel DBH lebih besar dari nilai  $\alpha = 5\%$  ( $0,094 > 0,05$ ) sehingga dapat disimpulkan DBH tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa DBH yang diterima oleh Kota Samarinda sangat sedikit, ini dikarenakan DBH Kota Samarinda sebagian besar berasal dari sektor migas (minyak dan gas) dan pertambangan khususnya batu bara. Penurunan penerimaan DBH ini disebabkan oleh penurunan produksi minyak dan harga batubara yang belum stabil sehingga berdampak vital bagi dunia usaha terutama sektor pertambangan. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Imas Sherli Febriana (2015) dan Firnandi Heliyanto (2016) yang menyatakan bahwa DBH berpengaruh terhadap belanja modal.

### **Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal**

Hipotesis Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal ini ditolak karena berdasarkan pengujian besarnya nilai signifikansi dari Variabel DAU lebih besar dari nilai  $\alpha = 5\%$  ( $0,075 > 0,05$ ) sehingga dapat disimpulkan DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa DAU yang selama ini diterima oleh daerah diindikasikan tidak digunakan untuk Belanja Modal, hal ini dapat dilihat pada penelitian ini. DAU bersifat "*Block Grant*", memungkinkan daerah menggunakan sesuai dengan peruntukan pembiayaan pengeluaran rutin, seperti untuk belanja pegawai dan hanya sedikit untuk belanja modal.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini diartikan bahwa daerah yang mendapatkan PAD yang lumayan besar akan tetapi belum mampu memberikan kontribusi terhadap belanja modal, ini dikarenakan porsi PAD masih sangat kecil digunakan dalam membiayai belanja modal, realitanya menunjukkan yang terjadi bahwa PAD sangat besar digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan belanja lainnya.

DBH berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa DBH yang diterima oleh Kota Samarinda sangat sedikit, ini dikarenakan DBH Kota Samarinda sebagian besar berasal dari sektor migas (minyak dan gas) dan pertambangan khususnya batu bara. Penurunan penerimaan DBH ini disebabkan oleh penurunan produksi minyak dan harga batubara yang belum stabil sehingga berdampak vital bagi dunia usaha terutama sektor pertambangan.

DAU berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa DAU yang selama ini diterima oleh daerah diindikasikan tidak digunakan untuk Belanja Modal, hal ini dapat dilihat pada penelitian ini. DAU bersifat "*Block Grant*", memungkinkan daerah menggunakan sesuai dengan peruntukan pembiayaan pengeluaran rutin, seperti untuk belanja pegawai dan hanya sedikit untuk belanja modal.

#### **Saran**

Pemerintah Daerah Kota Samarinda diharapkan tidak berharap terlalu besar kepada pemerintah pusat dalam hal penerimaan Dana Perimbangan, akan tetapi bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara intensif untuk meningkatkan PAD.

Pemerintah Daerah Kota Samarinda diharapkan mampu mengelola keuangan daerah melalui rasionalisasi anggaran dengan menerapkan kegiatan yang bersifat *Outcome* (hasil) yang memberikan kemanfaatan pada masyarakat bukan fokus terhadap *Output* kegiatan.

Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel-variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya, maupun variabel non-keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Febriana, I. S. 2015. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur*. Surabaya. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIESIA) Surabaya.
- Heliyanto. F. 2016. *Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Surabaya. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIESIA) Surabaya.
- Hasan. M. I. 2001. *Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif)*. PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Halim. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta
- Harahap. 2010. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Rajawali Pers. Jakarta
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2016*. 2017. Samarinda. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2015*. 2016. Samarinda. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2014*. 2015. Samarinda. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2013*. 2014. Samarinda. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2012*. 2013. Samarinda. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 1995 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Kepada 26 Daerah Tingkat II Percontohan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah*.
- Siahaan, Marihot. P., 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Dana Perimbangan*.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Belanja Daerah*.
- Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Jakarta. PT Raja Grafinda Persada